

PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPPINA

REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPPINA :

Berhasrat untuk mengadakan kerja-sama yang lebih efektif antara kedua negara dalam memberantas kejahatan dan, terutama, mengetahui dan meningkatkan hubungan antara mereka dalam masalah ekstradisi,

Telah Menetapkan Persetujuan Sebagai Berikut :

Pasal I

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN
EKSTRADISI

Masing-masing Pihak yang mengadakan Perjanjian bersepakat untuk saling menyerahkan, dalam hal-hal dan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini, orang-orang yang ditertarikan dalam wilayahnya yang dilakukw, dituntut atau dinyatakan bersalah atau dihukum karena melakukan salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal II Perjanjian ini yang dilakukan dalam wilayah Pihak lainnya atau diluar wilayah tersebut menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal IV,

PASAL II

KEJAHATAN YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

A. Orang-orang yang diserahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Perjanjian ini adalah mereka yang diadanya, dituntut atau dihukum karena melakukan salah satu kejahatan yang terdapat di bawah ini, dengan ketentuan bahwa kejahatan itu menurut hukum kedua Pihak yang mengadakan perjanjian dapat dihukum dengan hukuman mati atau perampasan kemerdekaan dengan jangka waktu diatas satu tahun :

1. Pembunuhan berencana, pembunuhan berjajel atau itu sendiri, pembunuhan anak, dan pembunuhan;
2. Perampasan, perbuatan asial dengan kekerasan, perampasan yang tidak sah dengan atau terhadap wanita dibawah umur yang ditentukan oleh hukum pidana dari masing-masing Pihak yang mengadakan Perjanjian.
3. Penculikan, Penculikan anak.
4. Perampasan berat yang mengakibatkan cacat badan, perampasan, pembunuhan berencana yang gagal atau pembunuhan yang gagal.
5. Perampasan secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
6. Perbudakan, perampasan.
7. Perampasan; pencurian.
8. Perampasan; penipuan.
9. Perampasan; ancaman; paksaan.

10. Penyampai korupt.
 11. Pemalsuan dokumen; surpah palsu.
 12. Pemalsuan barang; pemalsuan uang.
 13. Penyelundupan.
 14. Menimbalkan kebekaman; penguraian barang.
 15. Perbojakan udang; pembajakan laut; pembekasatan dikapal.
 16. Kejahatan yang bersangkutan dengan narkoba, obat-obat berkekuatan atau terlarang atau bahan-bahan kimia terlarang.
 17. Kejahatan yang bersangkutan dengan senjata api, bahan-bahan peledak atau bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.
8. Penyidikan juga akan dilakukan untuk penyertaan dalam salah satu kejahatan yang disebutkan dalam Pasal ini, tidak saja sebagai pelaku utama atau peserta, melainkan juga sebagai pembantu, demikian juga halnya dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut diatas, bila penyertaan, percobaan atau pemufakatan jahat itu dapat dihukum menurut hukum kedua Kitab yang mengadakan Perjanjian dengan hukuman pemaksaan kemerdekaan diatas satu tahun.
- C. Penyidikan dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan Pihak yang

dipinta terhadap suatu kejahatan lainnya, yang dapat di-
selesaikan sesuai dengan hukum kedua Pihak yang mengadakan
Perjanjian.

- D. Jika penyerahan diminta untuk suatu kejahatan yang tercantum
dalam ayat A, B atau C Pasal ini dan kejahatan itu dapat di-
hukum menurut hukum kedua Pihak yang mengadakan perjanjian
dengan hukuman penempatan kemerdekaan diatas atau tanpa, ke-
jahatan tersebut dapat diserahkan menurut ketentuan-ketentuan
Perjanjian ini tidak peduli apakah hukum kedua Pihak yang
mengadakan Perjanjian menempatan kejahatan itu dalam penggo-
longan kejahatan yang sama atau memisalkannya dengan istilah
yang sama, asal saja unsur-unsurnya sesuai dengan salah satu
kejahatan-kejahatan atau lebih yang disebutkan dalam Pasal ini
menurut hukum kedua Pihak yang mengadakan Perjanjian ini.

Pasal III

TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN

Pihak yang diminta dapat menolak penyerahan orang yang
diminta untuk kejahatan yang menurut hukum Pihak yang diminta,
dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayahnya atau ditempat
yang diperlakukan sebagai wilayahnya.

Pasal IV

WILAYAH

- A. Didalam Perjanjian ini, yang dimaksud wilayah dari Pihak

yang mengadakan Perjanjian, ialah semua wilayah dibawah yurisdiksi Pihak yang mengadakan Perjanjian itu, meliputi ruang-angkasa, wilayah air dan landas kontinen, dan kendaraan-kendaraan air dan pesawat udara yang terdaftar diNegara Pihak yang mengadakan Perjanjian, bila pesawat udara itu sedang dalam penerbangan atau bila kendaraan air itu berada dilaut-bebas waktu kejahatan itu dilakukan. Menurut Perjanjian ini, sebuah pesawat udara akan dianggap berada dalam penerbangan pada saat ketika semua pintunya ditutup untuk mencegah sampai saat ketika pintu itu dibuka untuk disembarkasi.

B. Bila kejahatan yang diminatkan penyerahannya itu dilakukan diluar wilayah Negara meminta, Pejabat Pelaksanaan dari Negara yang diminta berwenang untuk melakukan penyerahan jika menurut hukum dari Negara yang diminta, kejahatan yang dilakukan itu dalam keadaan-kedatan yang sama juga diancam dengan hukuman.

C. Penentuan wilayah Pihak yang diminta diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.

Pasal V

KEJAHATAN POLITIK

A. Penyerahan tidak akan dilakukan jika kejahatan yang diminatkan penyerahan itu dianggap oleh Pihak yang diminta sebagai kejahatan politik.

- B. Jika timbul persoalan apakah suatu perkara merupakan suatu kejahatan politik, maka keputusan para pejabat dari negara yang diminta akan menentukan.
- C. Menghilangkan atau parolasi menghilangkan nyawa Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari masing-masing Pihak yang mengadakan Perjanjian atau anggota keluarganya tidak akan dianggap sebagai kejahatan politik sebagaimana dimaksud oleh Perjanjian ini.

Pasal VI

PENYERAHAN WARGA NEGARA

- A. Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menolak penyerahan warganegaraanya.
- B. Jika Pihak yang diminta tidak menyerahkan warganegaraanya, Pihak itu atas permintaan Pihak peninta wajib menyerahkan perkara bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta untuk penuntutan. Untuk maksud ini berkas perkara-berkas perkara, keterangan-keterangan dan bukti-bukti mengenai kejahatan itu wajib diserahkan oleh Pihak peninta kepada Pihak yang diminta.
- C. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat B pasal ini, Pihak yang diminta tidak akan diwajibkan untuk menyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi.

Pasal VII

PENGECEUALIAN DARI KEWAJIBAN UNTUK
MENYERAHKAN

Penyerahan tidak akan dilakukan dalam salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bila orang yang dimaksudkan penyerahannya telah diadili dan dibebaskan atau telah menjalani hukumannya di Negara ketiga untuk kejahatan yang menimbulkan penyerahannya.
2. Bila penuntutan atau pelaksanaan hukuman untuk kejahatan telah gugur karena kedaluwarsa menurut salah satu dari Pihak yang mengadakan Perjanjian.
3. Bila kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum atau peraturan-peraturan militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum.

Pasal VIII

LARANGAN PENGULANGAN
PENUNTUTAN ATAU PERADILAN

Penyerahan juga tidak akan dilakukan dalam salah satu hal berikut ini :

1. Bila putusan terakhir pengadilan sudah dijatuhkan oleh pejabat yang berwewenang dari Pihak yang diminta terhadap orang

yang diminta bertalian dengan kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang diminta penyerahannya.

1. Bila orang yang diminta penyerahannya sedang atau telah dituntut atau telah dituduh dan dituduhkan atau dituhun oleh Negara yang diminta untuk kejahatan yang diminta penyerahannya.

Pasal IX

AZAS KEKHUSUSAN

Setiap orang yang diserahkan tidak akan dituntut, dihukum atau dihukum untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum penyerahannya, selain daripada kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- (a). Bila Pihak yang diminta menyerahkan orang itu menyetujuinya. Permohonan persetujuan disampaikan kepada Pihak yang diminta, disertai dengan dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal XVII. Persetujuan akan diberikan jika kejahatan itu termasuk kejahatan yang dapat diminta penyerahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal II Perjanjian ini; dan
- (b). Bila orang itu setelah mempunyai kesempatan untuk meninggalkan wilayah Pihak kepada Siapa ia diserahkan, tidak menggunakan kesempatan itu dalam waktu 45 hari setelah

pen bebaskan nya, atau kembali lagi ke wilayah itu sudah ia meninggalkan nya.

Pasal X

HUKUMAN MATI

Jika kejahatan yang dituntutkan penyerahannya dapat dihukum dengan hukuman mati menurut hukum Pihak peninta, tetapi jika untuk kejahatan itu tidak ditentukan hukuman mati oleh hukum Pihak yang diminta atau jika hukuman mati biasanya tidak dilaksanakan, maka penyerahan dapat ditolak kecuali apabila Pihak peninta dapat memberikan jaminan yang oleh Pihak yang diminta dipandang cukup bahwa hukuman mati tidak akan dilaksanakan.

Pasal XI

PENAHANAN SEMENTARA

- (1). Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang dari Pihak peninta dapat meminta penahanan sementara terhadap seseorang yang dicari. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta akan menanggapi kaputusan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukumnya.
- (2). Dalam permintaan untuk penahanan sementara diterangkan bahwa dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal XVII

tersedia dan bahwa ada alasan untuk memperjelas permintaan penyerahan. Diterangkan juga untuk kejahatan apa penyerahan itu akan diminta, bila dan dimana kejahatan itu dilakukan dan sedapat mungkin wajib memuat uraian tentang orang yang dicari.

- (3). Permintaan untuk penahanan sementara disampaikan di Indonesia kepada National Central Bureau (NCB) Indonesia/Interpol dan di Philippina kepada National Bureau of Investigation, atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram atau melalui International Criminal Police Organization (INTERPOL).
- (4). Pejabat Pihak peninta akan diberitahukan dengan segera keputusan atas permintaannya.
- (5). Penahanan Sementara dapat diakhiri, jika dalam waktu 20 hari setelah penahanan Pihak yang diminta tidak menerima permintaan penyerahan dan dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal XVII.
- (6). Pembekuan sementara dari penahanan sementara tidak menghalangi penahanan kembali dan penyerahan jika permintaan untuk penyerahan diterima sesudah itu.

Pasal XII

PENYERAHAN ORANG YANG AKAN
DISERAHKAN

- (1). Pihak yang diminta akan memberitahukan keputusannya tentang permintaan penyerahan kepada Pihak peninta melalui saluran diplomatik.
- (2). Untuk setiap permintaan yang ditolak wajib diberikan alasan-alasannya.
- (3). Jika permintaan disetujui, Pihak peninta wajib diberi tahu tentang tempat dan tanggal penyerahan dan namanya orang yang bersangkutan ditukar untuk melalui penyerahan.
- (4). Jika orang yang diminta penyerahannya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat (5) pasal ini ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 hari dan bagaimanapun juga wajib dilepaskan sesudah lampau 30 hari dan Pihak yang diminta dapat memulak penyerahannya untuk keajaiban yang sama.
- (5). Jika keadaan atau keadaannya tidak memungkinkan suatu Pihak untuk menyerahkan atau mengambil orang yang bersangkutan, maka Pihak itu wajib memberitahukan Pihak lainnya. Kedua Pihak akan menampung bersama tanggal lain untuk penyerahan. Dalam hal demikian akan berlaku

ketentuan-ketentuan dari ayat (4) Pasal 1a1.

Pasal XIII

PINYRAHAN YANG DITUNDA

Pihak yang diminta, sesudah mengambil keputusan tentang pemberian penyerahan, dapat menunda penyerahan orang yang diminta, supaya orang itu dapat diperikannya, atau jika ia sudah dijatuhi hukuman, supaya orang itu dapat menjalani hukumannya dalam wilayah Pihak itu untuk kejahatan lain daripada kejahatan yang diminta penyerahannya.

Pasal XIV

PENYERAHAN BARANG

- (1). Pihak yang diminta, sepanjang hukunya memperbolehkan dan atas permintaan dari Pihak penista wajib meminta dan menyerahkan barang :
 - (a) yang mungkin diperlukan sebagai bahan pembuktian, atau
 - (b) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan itu dan yang terdapat pada orang yang dituntut pada waktu pemberian ditakikan atau yang dikawatirkan sesudah itu.
- (2). Barang yang disebut dalam ayat (1) Pasal 1a1 wajib diserahkan, sekalipun eksteradisi yang telah dituntut Pihak dapat

dilakukan karena kemauan orang yang diminta penyerahannya atau karena ia menarik diri.

- (2). Apabila barang tersebut dapat ditarik atau dirampas dalam wilayah dari Pihak yang diminta, maka dalam hubungan dengan proses pemeriksaan pidana yang sedang berjalan, Pihak ini dapat menahannya untuk sementara atau menyahkannya dengan syarat bahwa barang itu akan dikembalikan.
- (4). Setiap hak yang mungkin diperoleh Pihak yang diminta atau Negara lain atas barang tersebut wajib dipanai. Dalam hal demikian, barang tersebut wajib dikembalikan tanpa biaya kepada Pihak yang diminta secepat mungkin sesudah pemeriksaan pengadilan selesai.

Paragraf XV

TATA CARA

Tata-cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara dari orang yang diminta penyerahannya, akan tunduk semata-mata pada hukum Pihak yang diminta.

Paragraf XVI

BIAYA - BIAYA

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam wilayah Pihak yang diminta berkenaan dengan penyerahan akan ditanggung oleh Pihak itu.

SURAT PERMINTAAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN
YANG DIPERLUKAN

- (1). Permintaan penyerahan wajib dinyatakan secara tertulis dan dikirim di Indonesia kepada Menteri Kehakiman dan di Philipina kepada *Secretary of Justice*, melalui saluran diplomatik.
- (2). Permintaan penyerahan wajib disertai :
 - (a). Lembaran asli atau salinan yang disahkan dari peng-hukuman dan pidana yang dapat segera dilaksanakan atau surat perintah penahanan atau surat perintah lainnya yang mengunsyi akibat yang akan dan di-keluarkan sesuai dengan tata-cara yang ditetapkan dalam hukum Filipina perintah.
 - (b). Keterangan dari kajalanan yang diminta penyerahan-nya. Waktu dan tempat kajalanan dilakukan, urutan jurisdiksi dan penunjukan pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan diuraikan secepat mungkin, dan
 - (c). Salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau jika hal tidak mungkin suatu keterangan tentang hukum yang bersangkutan dan urutan secepat mungkin dari e-ring yang diminta penyerahannya beserta-sama dengan

keuntungan lain apapun juga yang dapat membantu menentukan identitas dan kebangsaannya.

- (3). Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyerahan akan dibuat dalam bahasa Inggris.

Pasal XVIII

PERMINTAAN LEBIH DARI SATU

Pihak yang mengadakan perjanjian yang menerima dua permintaan atau lebih untuk penyerahan orang yang sama baik untuk kejahatan yang sama maupun untuk kejahatan-kejahatan yang berbeda, akan menentukan kepada Negara-negara peninta atas Pihak tersebut akan menyerahkan orang yang dicari, dengan mempertimbangkan keadaan dan terutama kemungkinan penyerahan kemudian diantara Negara-negara peninta, sifat beratnya setiap kejahatan, tempat dilakukannya kejahatan, kewarganegaraan orang yang dicari, tanggal diterimanya permintaan, dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi antara Pihak itu dengan Negara atau Negara-negara peninta lainnya.

Pasal XIX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul antara kedua Pihak karena penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai dengan musyawarah atau perundingan.

Pasal XX

KETENTUAN PERALIHAN

Suatu kebijakan yang telah dimulai sebelum tanggal Perjanjian ini mulai berlaku akan tetapi dilaksanakan setelah tanggal Perjanjian ini dimulai berlaku akan diserahkan sesuai dengan Perjanjian ini.

Pasal XXI

MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Ratifikasi.

Pasal XXII

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan maksud untuk melakukan itu 6 (enam) bulan sebelumnya. Pengakhiran Perjanjian yang demikian itu tidak akan menghalangi suatu proses yang telah dimulai sebelum pemberitahuan demikian dilakukan.

UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang bertanda tangan di bawah ini yang dikuasakan secara sah oleh masing-masing Pemerintahnya telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat dalam rangkaiap dua di Jakarta pada tanggal
sepuluh Pebruari 1978, dalam bahasa Indonesia^{Philippine} dan bahasa Inggris, semua naskah adalah sama-sama sahny. *14/2/78*
MS

Dengan hal terjadi perbedaan kefasias, maka naskah ba-
hasa Inggris menentukan.

Untuk Pemerintah
REPUBLIK INDONESIA

Muchtar

Untuk Pemerintah
REPUBLIK PHILIPPINA

Vicente A. Santos

PROTOKOL

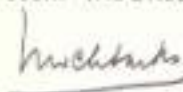
REPUBLIK INDONESIA dan REPUBLIK PHILIPPINA,
berhasrat untuk menghindari perselisihan yang berlainan atas bagian
dari Perjanjian Batas-batas yang menyanggung hal wilayah, telah
menapati persetujuan sebagai berikut :

Bahwa Republik Indonesia adalah pemilik tunggal dari
palau yang dikenal sebagai Las Palmas (P. Menges) sebagai ha-
sil dari putusan perwasitan yang dilakukan pada tanggal 4 April
1928 (Amerika Serikat dan Negeri Belanda).

UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang bertanda tangan di-
bawah ini, yang dibuatkan secara sah oleh masing-masing Pene-
rintahnya, telah menanda-tangani Protokol ini.

DIBUAT dalam rangkai dua di Jakarta pada tanggal
sepuluh Februari 1976.

Untuk Pemerintah
REPUBLIK INDONESIA



Untuk Pemerintah
REPUBLIK PHILIPPINA





KASUNDUAN SA EKSTRADISYON NG
REPUBLIKA NG PILIPINAS
AT NG
REPUBLIKA NG INDONESIA



ANG REPUBLIKA NG PILIPINAS AT ANG REPUBLIKA NG
INDONESIA:

Sa hangaring higit na maging mabisa ang pagtutulongan
ng dalawang bansa sa pagsugpo ng krimen at, higit sa lahat, ay
pangulagaan at sa gayon ay palatagin ang kanilang ugnayang
nasukol sa ekstradisyen,

AY NAGKASUNDO AYON SA SUMUSUNOD:

ARTIKULO I

Pananagutan sa Pangpapahalik

Sumatang-ayon ang bawat Nagkakasundong Panig na ibalik
sa kabilang bansa, batay sa mga pangyayari at ayon sa mga
nakasaad na tadhana sa Kasunduang Ito, ang mga taong mata-
tagpuan sa teritoryo nito na nasasakdal o naperatangan ng,
napatunayang nagkasala o nahatulan sa, alin man sa mga krimeng
napapaloob sa Artikulo II ng Kasunduang Ito na ginawa
sa teritoryo ng kabilang bansa, o sa labas nito batay sa mga
tadhanang tinutukoy sa Artikulo IV.

ARTIKULO II

Mga Krimeng Saklaw ng Ekstradisyon

A. Alinmaned sa mga tadhana ng Kasunduang Ito, ibabalik
ang mga taong nasasakdal o naperatangan ng, napatunayang
nagkasala o nahatulan sa, alinman sa mga sumusunod na krimen
sa kondisyong ang mga krimeng Ito ay mapapatawan sa mga
batas ng dalawang Nagkakasundong Panig ng porusang kanatayan
o pagkubilianggong hihigit sa isang taon:

1. Pagpatay; parihidyo; inparihidyo; at omisidyo,
2. Panggagahata; lubag sa batas na panghahalay sa mga
menor-de-edad na tinutukoy ng mga batas penal ng
dalawang Nagkakasundong Panig,

3. Pagdukot; pagkita;
4. Pambubugbog; pamanakil; nobigong pagpapay,
5. Illegal o di-makabwirang pagdeteni,
6. Pang-salipin; pambububog,
7. Pagmanakaw,
8. Estape; pagluslay ng salapi; panifinlang; pandarayo; panloloko,
9. Pangingilit; pamanakot; pagbabanta,
10. Panunahel o pagtanggap ng sahod; katiwalian; masamang panunungkulan,
11. Paliplikasyon; pagsumpa nang walang katotohanan,
12. Panghukawad ng kasulatan o salapi,
13. Paggupalit,
14. Pamanatog; paninira ng ari-arian,
15. Pandarambong; pag-sala,
16. Mga paglabag sa batas hinggil sa narkotika, mapangarib o bawal na gamot o bawal na kemikal,
17. Mga paglabag sa batas hinggil sa mga sanlatang gumaputok, papalak, o pampambog.

B. Ipagkakaloob din ang ekstradisyon sa pagkakasangkot sa alinman sa mga krimeng nabanggit sa Artikulong ito, hindi lamang bilang mga pag-unahing negkasala o kasabwat, kundi bilang mga kasangkot din, at maging sa pagtatangkang gumawa o sabwatang gumawa ng alinman sa mga naturang krimen, kung ang gayong pagkakasangkot, pagtatangka o sabwatan ay mapaparusahan ng pagkabilangang hihigil sa isang taon sa ilalim ng mga batas ng dalawang Nagkakasundong Panig.

K. Maaari ding ipagkaloob ang ekstradisyon sa pagpapasiya ng hinihilingang Panig tungkol sa ita pa mang krimen na manari ilang ipagkaloob alinman sa mga batas ng dalawang Nagkakasundong Panig.

D. Kapag humiling ng ekstradisyon sa alinman krimeng hindi mapapaloob sa mga tabaun A, B o K ng Artikulong ito ang krimeng iyan ay mapaparusahan ng pagkabilangang hihigil sa isang taon sa ilalim ng mga batas ng dalawang Nagkakasundong Panig, ang gayong krimen ay masasaklaw ng ekstra-

disyon sa ilalim ng mga lathala ng Kasunduang ito magkauri man ng kategoriya o hindi ang krimeng iyon sa mga batas ng dalawang Nagkakasundong Panig o magkahula man o hindi ng tawag sa krimeng iyon, sa kondisyong tumutugon ang mga elemento ng krimen sa isa o higit pang krimen na binabanggit sa Artikulong ito sa ilalim ng mga batas ng dalawang Nagkakasundong Panig.

ARTIKULO III

Puwangyarihan

Maaring tumanggi ang hinihilingang Panig na italik ang isang tao na pinagpahabol sa isang krimeng ituturing ng mga batas nito na kabuuan o may bahaging ginawa sa teritoryo nito o sa isang lugar na ituturing na teritoryo nito.

ARTIKULO IV

Kinababatang Teritoryo

A. Ang itutukoy ng Kasunduang ito na teritoryo ng isang Nagkakasundong Panig ay tumutukoy sa lahat ng teritoryong saklaw niyong Nagkakasundong Panig, kabilang ang himpapawid nito, saklaw na karagatan at baybayin, at sa mga sasakyang-dagat at sasakyang panghimpapawid na nakarehistro doon sa Nagkakasundong Panig kung ang alinang gayong sasakyang-dagat ay nasa karagatan nang maganap ang krimen. Sa ikalilina ng Kasunduang ito, ituturing na lumilipad ang isang sasakyang panghimpapawid mula sa sandaling masama ang lahat nitong pinluwang panlabas matapos makapaghula hanggang sa sandaling nabuksan ang alinang gayong pintuan para makapagbaba ng sakay.

B. Kapag hiniling ang ekstradisyon sa isang krimeng ginawa sa labas ng teritoryo ng hinihiling na Bansa, nasa kapangyarihan ng Pamahalaan ng hinihilingang Bansa ang pagkakaloob ng ekstradisyon kung ang mga batas ng hinihilingang Bansa ay nagpapataw ng parusa sa krimeng ginawa sa mga kahula ng pangyayari.

K. Ang pagtiyak sa teritoryo ng hinihilingang Panig ay masasalig sa mga punbansang batas nito.

ARTIKULO V

Mga Krimeng Pampulitika

A. Hindi ipagkakaloob ang ekstradiyon kung ang krimeng tinutungkol sa paghiling nito ay kinuturing ng hinihilingang Panig na isang krimeng pampulitika.

B. Kung may alinlangan sa pagiging krimeng pampulitika ng isang kaso, bibigyang-halaga ang pasiya ng mga maykapangyarihan ng hinihilingang Bansa.

K. Sa ikalimaw ng Kasunduang ito, ang pagpatay o tangkang pagpatay sa Puno ng Bansa o Puno ng Pamahalaan ng alinman sa mga Nagkakasundong Panig o sa isa niyang kaanak ay hindi ituturing na isang krimeng pampulitika.

ARTIKULO VI

Extradisyon ng mga Mamamayan

A. May karapatan ang bawat Panig na tumanggap sa ekstradiyon ng mamamayan nito.

B. Kapag tumanggap sauko ng hinihilingang Panig ang mamamayan nito, itatanggap ng Panig na iyon sa kahilingan ng humihiling na Panig ang kaso sa mga kinatawagang maykapangyarihan ng una para pag-usig. Sa layuning ito, ibibigay ng humihiling na Panig sa hinihilingang Panig ang mga tala, imperasyon at eksibit na kaugray sa krimen.

K. Sa gayon iniraraad ng talatahan B ng Artikulong ito, hindi kinakailangang itatrap ng hinihilingang Panig ang kaso sa mga kinatawagang nitong maykapangyarihan para pag-usig kung walang kapangyarihan dito ang mga maykapangyarihan.

ARTIKULO VII

Mga Katatibungan sa Panatagutan sa Pagsasuko

Hindi ipagkakaloob ang ekstradiyon sa alinman sa mga sumusunod na pangyayari:

1. Kapag ang ipinatutukong tao ay nalitis na at napawalang-sala o naparusahan na sa ibang Bansa para sa krimeng nasukat sa hinihiling na ekstradiyon.

2. Kapag ang pag-usig o pagpapataw ng parusa ukol sa krimen ay nawalang-bisa sa pamamagitan ng kautusan o paglipas ng panahon sa alinman sa mga Nagkakasundong Panig.

3. Kapag ang krimen ay kinapapalooban ng isang paghahaglaban sa batas o mga alintuntin ng hukbo na hindi isang krimen sa ilalim ng karaniwang batas kriminal.

ARTIKULO VIII

Mulang Pag-uusig

Hindi rin ipagkakaloob ang ekstradisyon sa alinman sa sumusunod:

A. Kapag nabigyan na ng pangwakas na hatol ng mga kinatawulang maykapangyarihan ng hinihilingang Panig ang pinaguhabol na tao kasabay ng krimen o mga krimeng nauukol sa hinihiling na ekstradisyon.

B. Kapag ang ipinapatakong tao ay pinag-uusig o natatagdal o nahatulan na at pinawalang-sala o pinatawan ng parusa ng hinihilingang Bansa para sa krimeng nauukol sa hinihiling na ekstradisyon.

ARTIKULO IX

Natatanging Pagpapasiya

Ang isang isinukong tao ay hindi pag-uusigin, papatawan ng parusa o idedetini para sa ano mang krimeng iba pa sa kinatawulan niyang ekstradisyon na ginawa bago siya isuke liban sa mga sumusunod na kaso:

(a) Kapag may pahintulot ng hinihilingang Panig na magmuko sa kanya. Ibahrap ang isang kahilingan sa pahintulot sa hinihilingang Panig, kasalip ang mga kasulatang binabanggit sa Artikulo XVII. Ibibigay ang pahintulot kapag ang krimeng nauukol sa kahilingan ay saklaw mismo ng ekstradisyon alinsunod sa mga tadhana ng Artikulo II ng Kasunduang ito; at

(b) Kapag ang isinukong tao, kahit may pagkakataon, ay hindi umalis sa teritoryo ng Panig na pinagsukuan sa kanya sa loob ng 45 araw pagkaraan ng lubos na pagpapasiya sa kanya, o kapag bumalik siya sa teritoryong iyon makaraang umalis dito.

ARTIKULO X

Parusang Kamatayan

Kung ang krimeng nauukol sa hinihiling na ekstradisyon ay mapaparusahan ng kamatayan sa ilalim ng batas ng hinihiling

na bansa, at kung sa gayang krimen ay walang kasulatang parusang kamatayan na ilinilathala sa batas ng hinihilingang Panig o hindi ito karaniwang isinasagawa, maaaring tanggihan ang ekstradisyon mulihan kung mangangako ang humihiling na Panig na sa palagay ng hinihilingang Panig ay sapat ang katiibayon na hindi isasagawa ang parusang kamatayan.

ARTIKULO XI

Pansamantalang Pagdakip

- (1) Kagag kailangang-kailangan, maaaring hilingin ng mga kasulatang maykapangyarihan ng humihiling na Panig ang pansamantalang pagdakip sa pinagkahabol na tao. Ito ay pagpapasiyahan ng mga kasulatang maykapangyarihan ng hinihilingang Panig alinsunod sa batas nito.
- (2) Kailangang nasasaad sa kahilingan sa pansamantalang pagdakip na may mga kasulatang binabanggit sa Artikulo XVII at nilalayon ito sa paghiling ng ekstradisyon. Kailangang nasasaad din ang krimeng nauukol sa hinihiling na ekstradisyon at kailan at saan naganap ang gayang krimen at kailangang hangga't masari ay magbigay ng isang paglalarawan ng pinagkahabol na tao.
- (3) Ang isang kahilingan sa pansamantalang pagdakip ay kailangang ipadala sa Indonesiya, sa National Central Bureau (NCB) Indonesia Interpol, at sa Pilipinas sa Pantbangsang Kawanihan ng Pasisiyasat, kahit sa pamamagitan ng mga hatirang diplomatiko o hawiran sa koreo o pahatirang-kawad o sa pamamagitan ng **International Criminal Police Organization (INTERPOL)**.
- (4) Kailangang ipaalam agad sa humihiling na maykapangyarihan ang kinalabasan ng kahilingan nito.
- (5) Maaaring itigil ang pansamantalang pagdakip kung sa loob ng 20 araw makaraan ang pagdakip ay hindi pa natatanggap ng hinihilingang Panig ang kahilingan sa ekstradisyon at ang mga kasulatang binabanggit sa Artikulo XVII.
- (6) Ang pagpapalayo mula sa pansamantalang pagdakip ay hindi makahahadlang sa muling pagdakip at ekstradisyon.

yon kung pagkaraan ay matatanggap ang isang kahilingan sa ekstradiisyon.

ARTIKULO XII

Ekstradiisyon ng Pinagkahabol na Tao

- (1) Kailangang ipaalam ng hinihilingang Panig sa humihiling na Panig sa pamamagitan ng mga hatirang diplomatiko ang posilyo nito hinggil sa kahilingan sa ekstradiisyon.
- (2) Kailangang magbigay ng mga dahilan sa ano mang pagtanggap.
- (3) Kapag sumang-ayon sa kahilingan, kailangang ipaalam sa humihiling na Panig ang lugar at petsa ng pagsusuko at ang tagal ng pagkakakulong ng pinagkahabol na tao bago ito isuko.
- (4) Balay sa mga tadhana ng talatahan (5) ng Artikulong ito, kapag hindi kinuha ang pinagkahabol na tao sa petsang tipanan, masari siyang palayasin pagkalipas ng 15 araw at sa ano mang pangyayari ay palalaysin pagkalipas ng 30 araw at masaring tumanggi ang hinihilingang Panig na isuko siya sa gayon ding pagkakasala.
- (5) Kung may mga pangyayaring di-maliwasan na makahahadlang sa isang Panig upang isuko o kunin ang isang-kong tao, kailangang patalastasan nito ang kabilang Panig. Kailangang pagkasunduan ng dalawang Panig ang panibagong petsa ng pagsusuko at dito magkakabisa ang mga tadhana ng talatahan (4) ng Artikulong ito.

ARTIKULO XIII

Inilalang Pagsusuko

Matapos pagpasiyahan ng hinihilingang Panig ang kahilingan sa ekstradiisyon, masari nito ang pagpaliban ang pagsusuko sa pinagkahabol na tao upang siya ay mapag-usig ng Panig na iyon o kung siya ay nahatulan na, ay mopagpaliban niya ang kanyang sentensiya sa teritoryo ng Panig na iyon para sa isang krimeng bukod pa sa nasukel sa hinihiling na ekstradiisyon.

ARTIKULO XIV
Pagmamakita ng Ari-Arian

- (1) Kung ipinahihintulot ng batas nito at sa kahilingan ng hinihiling na Panig, sasamsamin at isusuko ng hinihilingang Panig ang mga ari-arian na:
 - (a) kakaibang bilang ebidensiya, o
 - (b) natamo sa pamamagitan ng krimen at sa oras ng pagdakilap ay natagpuan sa paglingat ng pinaghahabol na tao o nabeklasan ito pagkaraan.
- (2) Ang nabanggit na ari-arian sa talatahan (1) ng Artikulong ito ay isusuko kahit hindi maisasagawa ang napagkasunduang ekstradisyon dahil sa pagkamatay o pagtakas ng pinaghahabol na tao.
- (3) Kapag ang natatagang ari-arian ay kailangang sumasamin o kumplekahin sa teritoryo ng hinihilingang Panig kagmay ng mga nabibimbang pag-uusig sa krimen, maaari itong pansamantalang ingatan ng hinihilingang Panig o isuko ito sa kondisyong ito ay ibabalik.
- (4) Mananatili ang ano mang karapatang hawak ng hinihilingang Panig o ng iba pa mang Bansa sa naturang ari-arian. Saan man umiral ang ganitong mga karapatan, kailangang ibalik ang ari-arian nang walang sagulin sa hinihilingang Panig sa sandaling matapos ang paglilitis.

ARTIKULO XV
Panamaraan

Ang panamaraan tungkol sa ekstradisyon at pansamantalang pagdakilap sa taong hinihiling na isuko ay sasailalim sa batas ng hinihilingang Panig.

ARTIKULO XVI
Mga Gugulin

Sasagutin ng hinihilingang Panig ang mga gugulin sa teritoryo ng Panig na iyon bunga ng ekstradisyon.

ARTIKULO XVII

Kahilingan at mga Kaugnay sa Kamulan

- (1) Kahilangang nasusulat ang isang kahilingan sa ekstradisyon at ipadadala sa Indonesya sa Ministro ng Katarungan, at sa Pilipinas sa Kalihim ng Katarungan, sa pamamagitan ng mga hatirang diplomatiko.
- (2) Ang kahilingan ay kahilangang patunayan ng:
 - (a) orihinal o isang tanay na sipi ng habol at kalapatang sentensiya o ng mandamyento de arresto o iba pang utos na may ganitong bisa at ipinalabas alinsunod sa ilinalakbang alibutanin sa batas ng humihiling na Panig;
 - (b) isang utat sa krimeng nauukol sa hinihiling na ekstradisyon. Ilalahad nang tumpak ang oras at lugar nang isagawa ito, ang legal na paliwanag dito at isang pagbanggit sa mga nauugnay na tadhana ng batas; at
 - (c) isang sipi ng nauugnay na pagsasabatas o, kung hindi magagawa ito, isang paglalahad ng nauugnay na batas, at isang tamang paglalarawan ng pinag-hahabol na tao, kabilang ang iba pa nang impormasyon na makatutulong sa pagpapatunay ng kanyang kataruan at nasyonalidad.
- (3) Masasaad sa wikang Ingles ang mga katutalang gagamitin sa isasagawang ekstradisyon.

ARTIKULO XVIII

Maramihang Kahilingan

Pagpapasiyahan ng isang nagkakasundong Panig, na tumanggap ng dalawa o higit pang kahilingan para sa ekstradisyon ng isang tao sa isang krimen o sa iba't ibang krimen, kung saang humihiling na Bansa nila husuko ang pinag-hahabol na tao, na isasalang-alang ang mga pangyayari at higit sa lahat kung maaaring isagawa sa ibang panahon ang ekstradisyon sa pagitan ng mga humihiling na Bansa, ang bigat ng bawat krimen, sa pinangyarihan ng krimen, ang nasyonalidad ng pinag-hahabol na tao, ang petsa nang tanggapin ang mga kahilingan at ang mga tadhana ng aro mang kasunduan sa ekstradisyon sa pagitan ng Panig na iyon at ng iba pang humihiling na Bansa o mga Bansa.

ARTIKULO XIX
Pag-ayos ng Sakungatan

Ang mang sakungatan ng dalawang Panig bunga ng pagpapakahulugan o pagpapalupad sa Kasunduang Ito ay maayos na lubusin sa pamamagitan ng saragunian o pag-uusap.

ARTIKULO XX
Mga Tadhana ng Pansamantalang

Ang isang krimang sinimulan bago sumapit ang petsa ng pagkakabisa ng Kasunduang Ito subalit naganap pagkarsan ng petsa ng pagkakabisa ng Kasunduang Ito ay masasaklaw ng ekstradiyoson batay sa Kasunduang Ito.

ARTIKULO XXI
Pagkakabisa

Magkakabisa ang Kasunduang Ito sa petsa ng palitan ng mga Kasulatan sa Pagpapalibay.

ARTIKULO XXII
Pagwawakas

Manaring wakasan ng alinang Panig ang Kasunduang Ito sa ano mang oras, sa pamamagitan ng anim na buwang pantang-sabi ukol sa ganitong layunin. Hindi makapigil ang gayong pagwawakas sa ano mang pag-uusig na sinimulan bago pa ibigay ang gayong pasabi.

BILANG KATUNAYAN NITO, ang nakalagda sa itaas, na pinagkaleeban ng karampatang kopangyarihan ng kanilang Pamahalaan, ay karagda sa Kasunduang Ito.

GIBAWA sa tatlong sipi sa Jakarta, Indonesia ng Ika-10 araw ng Pebrero 1976, sa mga wikang Pilipino, Indones at Ingles, pawang mapananaligan ang lahat ng nasasaad. Kopag nagkakaisa ng pakahulugan, manalang ang nasasaad sa Ingles.

PARA SA PAMAHALAAN NG
REPUBLIKA NG PILIPINAS

PARA SA PAMAHALAAN NG
REPUBLIKA NG INDONESIA

Vicente A. Del Santos

Indonesian

PROTOKOL

ANG REPUBLIKA NG PILIPINAS AT ANG REPUBLIKA NG INDONESIA, sa hangaring maging maliwanag ang pakahulugan sa bahaging iyon ng Kasunduan sa ekstradisyon hinggil sa kaukulang teritoryo nito, ay nagkasundo sa Protokol na ito:

Na tanging pag-sari ng Republika ng Indonesia ang isang polong tinatawag na Les Palmes (P. Miangas) bunga ng katebo na itatol na ginawa noong Abril 4, 1923 (Ang Estados Unidos ng America at ang Netherlands).

BILANG KATURAYAN RITO, ang nakalagda sa ibaba, na ginagalaoban ng karangpang kapangyarihan ng kanilang Pamahalaan, ay lumagda sa Protokol na ito.

GINAWA sa tatlong sipi sa Jakarta, Indonesia ng ika-¹⁰ araw ng Pebrero, 1976, sa mga wikang Pilipino, Indones at Ingles, pawang mapananaligan ang lahat ng nasasaad. Kapag nagka-kalba ng pakahulugan, mananatig ang nasasaad sa Ingles.

PARA SA PAMAHALAAN NG
REPUBLIKA NG PILIPINAS

PARA SA PAMAHALAAN NG
REPUBLIKA NG INDONESIA

Vicente A. del Santos

Im. Santos

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF
THE PHILIPPINES:

Desiring to make more effective the cooperation of the two
countries in the repression of crime and, specifically, to regulate
and thereby promote the relations between them in matters of
extradition,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I

Obligation to Extradite

Each Contracting Party agrees to extradite to the other,
in the circumstances and subject to the conditions described in
this Treaty, persons found in its territory who are being pro-
ceeded against or who have been charged with, found guilty or
convicted of, any of the crimes covered by Article II of this
Treaty committed within the territory of the other, or outside
thereof under the conditions specified in Article IV.

ARTICLE II

Extraditable Crimes

A. Persons shall be delivered up according to the pro-

visions of this Treaty who are being proceeded against or who have been charged with, found guilty or convicted of, any of the following crimes provided that these crimes are punishable by the laws of both Contracting Parties by a possible penalty of death or deprivation of liberty for a period exceeding one year:

1. Murder; parricide; infanticide and homicide
2. Rape, indecent assault; unlawful sexual acts with or upon minors under the age specified by the penal laws of both Contracting Parties
3. Abduction; kidnapping
4. Mutilation; physical injuries; frustrated murder or frustrated homicide
5. Illegal or arbitrary detention
6. Slavery; servitude
7. Robbery; theft
8. Extortion; false pretences; swindling; fraud; cheating
9. Extortion threats; coercion
10. Bribery; corruption; graft
11. Falsification; perjury
12. Forgery; counterfeiting
13. Smuggling
14. Arson; destruction of property
15. Hijacking; piracy; mutiny

16. Crimes against the laws relating to narcotics,
dangerous or prohibited drugs or prohibited chemicals
17. Crimes against the laws relating to firearms, explosives,
or incendiary devices

B. Extradition shall also be granted for participation in any of the crimes mentioned in this Article, not only as principals or accessories, but also as accessories, as well as for attempt to commit or conspiracy to commit any of the aforementioned crimes, when such participation, attempt or conspiracy is punishable under the laws of both Contracting Parties by deprivation of liberty exceeding one year.

C. Extradition may also be granted at the discretion of the requested Party in respect of any other crimes for which it can be granted according to the laws of both Contracting Parties.

D. If extradition is requested for any crime encompassed by paragraphs A, B or C of this Article and that crime is punishable under the laws of both Contracting Parties by a deprivation of liberty exceeding one year, such crime shall be extraditable under the provisions of this Treaty whether or not the laws of both Contracting Parties would place that crime within the same category of crimes or designate the crime by the same terminology, provided the elements of the crime correspond to those of one or

more of the crimes mentioned in this Article under the laws of both Contracting Parties.

ARTICLE III

Place of Commission

The requested Party may refuse to extradite a person claimed for a crime which is regarded by its laws as having been committed in whole or in part in its territory or in a place treated as its territory.

ARTICLE IV

Territorial Application

A. A reference in this Treaty to the territory of a Contracting Party is a reference to all the territory under the jurisdiction of that Contracting Party, including its airspace, territorial waters and continental shelf, and to vessels and aircraft registered in that Contracting Party if any such aircraft is in flight or if any such vessel is on the high seas when the crime is committed. For purposes of this Treaty, an aircraft shall be considered to be in flight at any time from the moment when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation.

B. When the crime for which extradition has been requested has been committed outside the territory of the requesting

State, the Executive Authority of the requested State shall have the power to grant extradition if the laws of the requested State would provide for the punishment of crime committed in analogous circumstances.

C. The determination of the territory of the requested Party shall be governed by its national laws.

ARTICLE V

Political Crimes

A. Extradition shall not be granted if the crime in respect of which it is requested is regarded by the requested Party as a political crime.

B. If any question arises as to whether a case is a political crime, the decision of the authorities of the requested State shall be determinative.

C. The taking or attempted taking of the life of the Head of State or Head of Government of either of the Contracting Parties or of a member of his family shall not be deemed to be a political crime for the purpose of this Treaty.

ARTICLE VI

Extradition of Nationals

A. Each Party shall have the right to refuse extradition of

its nationals.

B. If the requested Party does not extradite its nationals, that Party shall at the request of the requesting Party submit the case to the competent authorities of the former for prosecution. For this purpose the files, information and exhibits relating to the crime shall be surrendered by the requesting Party to the requested Party.

C. Notwithstanding paragraph B of this Article, the requested Party shall not be required to submit the case to its competent authorities for prosecution if the authorities have no jurisdiction.

ARTICLE VII

Exceptions to Obligation to Extradite

Extradition shall not be granted in any of the following circumstances:

1. When the person whose surrender is sought has been tried and acquitted or has undergone his punishment in a third State for the crime for which his extradition is requested.

2. When the prosecution or the enforcement of the penalty for the crime has become barred by prescription or lapse of time of either of the Contracting Parties.

2. When the crime constitutes an infraction against military law or regulations which is not a crime under ordinary criminal law,

ARTICLE VIII

Double Jeopardy

Extradition shall not also be granted in any of the following:

A. When final judgment has been passed by the competent authorities of the requested Party upon the person claimed in respect of the crime or crimes for which extradition is requested,

B. When the person whose surrender is sought is being or has been proceeded against or has been tried and discharged or punished by the requested State for the crime for which his extradition is requested.

ARTICLE IX

Rule of Speciality

A person who has been extradited shall not be prosecuted, sentenced or detained for any crime committed prior to his surrender other than for which he was extradited except in the following cases:

- (a) When the requested Party which surrendered him consents. A request for consent shall be submitted

to the requested Party, accompanied by the documents mentioned in Article XVII. Consent shall be given when the crime for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the provisions of Article II of this Treaty; and

- (b) When the person, having had an opportunity to leave the territory of the Party to which he has been surrendered, has not done so within 45 days of his final discharge, or has returned to that territory after leaving it.

ARTICLE X

Capital Punishment

If the crime for which extradition is requested is punishable by death under the law of the requesting Party, and if in respect of such crime the death penalty is not provided for by the law of the requested Party or is not normally carried out, extradition may be refused unless the requesting Party gives such assurance as the requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

ARTICLE XI

Provisional Arrest

- (1) In case of urgency the competent authorities of the

requesting Party may request the provisional arrest of the person sought. The competent authorities of the requested Party shall decide the matter in accordance with its law.

- (2) The request for provisional arrest shall state that the documents mentioned in Article XVII exist and that it is intended to send a request for extradition. It shall also state for what crime extradition will be requested and when and where such crime was committed and shall as far as possible give a description of the person sought.
- (3) A request for provisional arrest shall be sent in Indonesia, to the National Control Bureau (N.C.B.) Indonesia Interpol, and in the Philippines to the National Bureau of Investigation, either through the diplomatic channels or direct by post or telegraph or through the International Criminal Police Organization (INTERPOL).
- (4) The requesting authority shall be informed without delay of the result of its request.
- (5) Provisional arrest may be terminated if, within a period of 20 days after arrest, the requested Party has not received the request for extradition and the documents mentioned in Article XVII.
- (6) Release from provisional arrest shall not prejudice

re-arrest and extradition if a request for extradition is received subsequently.

ARTICLE XII

Surrender of the Person to be Extradited

- (1) The requested Party shall inform the requesting Party through the diplomatic channels of its decision with regard to the request for extradition.
- (2) Reasons shall be given for any rejection.
- (3) If the request is agreed to, the requesting Party shall be informed of the place and date of surrender and of the length of time for which the Person claimed was detained with a view to surrender.
- (4) Subject to the provisions of paragraph (5) of this Article, if the person claimed has not been taken over on the appointed date, he may be released after the expiry of 15 days and shall in any case be released after the expiry of 30 days and the requested Party may refuse to extradite him for the same offense.
- (5) If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other party. The two Parties shall agree on a new date for surrender and the provisions of paragraph (4) of this Article shall apply.

ARTICLE XIII

Postponed Surrender

The requested Party may, after making its decision on the request for extradition, postpone the surrender of the person claimed in order that he may be proceeded against by that Party or, if he has already been convicted, in order that he may serve his sentence in the territory of that Party for a crime other than that for which extradition is requested.

ARTICLE XIV

Handing over of Property

- (1) The requested Party shall, insofar as its law permits and at the request of the requesting Party, seize and hand over property:
 - (a) which may be required as evidence, or
 - (b) which has been acquired as a result of the crime and which, at the time of the arrest, is found in the possession of the person claimed or discovered subsequently.
- (2) The property mentioned in paragraph (1) of this Article shall be handed over even if extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of the person claimed.

- (3) When the said property is liable to seizure or confiscation in the territory of the requested Party, the latter may, in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over on condition that it be returned.
- (4) Any right which the requested Party or any other State may have acquired in the said property shall be preserved. Where these rights exist, the property shall be returned without charge to the requested Party as soon as possible after the trial.

ARTICLE XV

Procedure

The procedure with regard to extradition and provisional arrest of the person requested to be extradited shall be governed solely by the law of the requested Party.

ARTICLE XVI

Expenses

Expenses incurred in the territory of the requested Party by reason of extradition shall be borne by that Party.

ARTICLE XVII

Request and Supporting Documents

- (1) A request for extradition shall be in writing and sent

in Indonesia to the Minister of Justice, and in the Philippines to the Secretary of Justice, through the diplomatic channels.

- (2) The request shall be supported by:
 - (a) the original or an authenticated copy of the conviction and sentence immediately enforceable or of the warrant of arrest or other order having the same effect and issued in accordance with the procedure laid down in the law of the requesting party;
 - (b) a statement of the crime for which extradition is requested. The time and place of its commission, its legal description and a reference to the relevant legal provisions shall be set out as accurately as possible; and
 - (c) a copy of the relevant enactment or, where this is not possible, a statement of the relevant law, and as accurate a description as possible of the person claimed, together with any other information which will help to establish his identity and nationality.
- (3) The documents to be used in extradition proceedings shall be drawn up in the English language.

ARTICLE XVIII

Multiple Requests

A contracting Party which receives two or more requests for the extradition of the same person either for the same crime, or for different crimes, shall determine to which of the requesting States it shall extradite the person sought, taking into consideration the circumstances and particularly the possibility of a later extradition between the requesting States, the seriousness of each crime, in the place where the crime was committed, the nationality of the person sought, the date upon which the requests were received and the provisions of any extradition agreements between that Party and the other requesting State or States.

ARTICLE XIX

Settlement of Disputes

Any dispute between the two Parties arising out of the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiations.

ARTICLE XX

Transitional Provisions

A crime committed prior to the date this Treaty enters into force but completed after the date this Treaty enters into force shall be extradited pursuant to this Treaty.

ARTICLE XXI

Entry into force

This Treaty shall enter into force on the date of exchange of Instruments of Ratification.

ARTICLE XXII

Termination

This Treaty may be terminated at any time by either Party giving the other six months' prior notice of its intention to do so. Such termination shall not prejudice any proceedings commenced prior to the giving of such notice.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in duplicate at Jakarta on the tenth day of February, 1976 in the Indonesian, ^{Philippine} and English languages, all the texts being ^{equally} authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA:

Muschtanks

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES:

Vicente Almad Santos

P R O T O C O L

The REPUBLIC OF INDONESIA and the REPUBLIC OF THE PHILIPPINES desiring to avoid any ambiguity in the interpretation of that part of the Extradition Treaty which touches on its territorial application have agreed on this Protocol :

That the Republic of Indonesia is the sole owner of an island known as *La Palma* (P. Mungat) as a result of the arbitral award made on April 4, 1929 (The United States of America and the Netherlands).

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Jakarta on the tenth day of February, 1976.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA:



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE
PHILIPPINES:

